

HALAMAN PENGESAHAN

Publikasi Ilmiah dengan Judul

**KESIAPAN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN
INKLUSI DI KABUPATEN KULON PROGO**

yang disiapkan dan disusun oleh

**Nurochmi Vitasari
NIM 1500005037**

telah direview dan dinyatakan layak untuk dipublikasikan sebagai salah satu
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan



Reviewer

Meita Fitrianawati, M. Pd
NIP. 60160941

Yogyakarta, Oktober 2019
Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Dr. Sri Tutur Martaningsih, M.Pd
NIP. 19630315 198611 2 001

KESIAPAN SEKOLAH DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI KABUPATEN KULON PROGO

Nurochmi Vitasari, Sri Tutur Martaningsih

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 19 Yogyakarta

E-mail: nurochmivita375@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research to describe the level of readiness of schools implementing inclusive education in Kulon Progo Regency and to determine the level of readiness of schools implementing inclusive education in Kulon Progo Regency. The aspect in terms of 6, aspects of school readiness. This study used quantitative descriptive method the Inclusive Education Provider Elementary School in Kulon Progo Regency. The subjects of this study were 23 headmasters of inclusive education providers in Kulon Progo Regency. Data collection techniques in this study using a questionnaire instrument. Data analysis techniques using descriptive statistics and the presentation of data using percentages. The results showed that: 1). The level of school readiness in implementing inclusive education in Kulon Progo Regency is ready at 78.2% or 18 school. There are 21.7% or 5 of schools that are not ready to implement inclusive education 2). The level of school readiness in implementing. The curriculum aspect is ready with a percentage of 82.6% or 19 school. The teaching staff aspect is ready with a percentage of 78.2% or 18 school. The facilities and infrastructure aspects are ready with a percentage of 78.3% or 18 school. Funding Aspects are ready with a percentage of 86.9% or 20 school. The school management aspect is ready with a percentage of 91.3% or 21 school. Environmental aspects are ready with a percentage of 91.3% or 21 school. The unpreparedness of schools in implementing successive inclusive education can be expressed in the aspects of (a) teaching staff as much as 21.7% or 4 school (b) facilities and infrastructure 21.7% or 5 school (c) curriculum 17.4% or 5 school (d) financial 13% or 3 school (e) school management 8.7% or 2 school (f) 8.7% school environment or 2 school.

Keywords: School readiness, inclusive education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo dan untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi Kabupaten Kulon Progo. Tingkat yang ditinjau dari 6 aspek kesiapan sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data diskriptif yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Penyelenggara

Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo. Subjek penelitian ini adalah 23 kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan instrumen angket. Teknik analisis data menggunakan statistik diskriptif dan penyajian data dengan menggunakan prosentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo dengan persentase 78,2% atau 18 sekolah siap dalam menerapkan pendidikan inklusi. Ada 21,7% atau 5 sekolah yang belum siap dalam menerapkan pendidikan inklusi 2). Tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan aspek kurikulum dengan persentase 82,6% atau 19 sekolah siap dalam aspek kurikulum. Aspek tenaga pendidik dengan persentase 78,2% atau 18 sekolah siap dalam aspek kurikulum. Aspek sarana dan prasarana dengan persentase 78,3% atau 18 sekolah siap dalam aspek pendanaan. Aspek Pendanaan dengan persentase 86,9% atau 20 sekolah siap dalam aspek pendanaan. Aspek manajemen sekolah dengan persentase 91,3% atau 21 sekolah siap dalam aspek manajemen sekolah. Aspek lingkungan dengan persentase 91,3% atau 21 sekolah siap dalam aspek lingkungan. Ketidaksiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi berturut-turut dapat dikemukakan dalam aspek (a) tenaga pendidik sebesar 21,7% atau 4 sekolah (b) sarana dan prasarna 21,7% atau 5 sekolah (c) kurikulum 17,4% atau 5 sekolah (d) pendanaan 13% atau 3 sekolah (e) manajemen sekolah 8,7% atau 2 sekolah (f) lingkungan sekolah 8,7% atau 2 sekolah.

Kata Kunci : Kesiapan sekolah, pendidikan inklusi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, baik manusia tersebut memiliki kebutuhan khusus maupun tidak memiliki kebutuhan khusus. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 dijelaskan pula, tak terkecuali warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial maupun intelektual berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Berdasarkan undang-undang tersebut, pendidikan harus diberikan kepada semua kalangan, baik memiliki kebutuhan khusus maupun tidak berkebutuhan khusus. Kemudian pemerintah mencetuskan sistem pendidikan inklusi di sekolah reguler. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusi Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing (Garnida, 2015: 47). Anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan di sekolah reguler bersama dengan anak-anak pada umumnya untuk mengoptimalkan potensi dan keterampilan yang di milikinya. Sekolah reguler yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah inklusi, harus mau dan mampu menerima anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun anak yang tidak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.

Dinas Pendidikan telah menunjuk beberapa sekolah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Dinas. Di Kabupaten Kulon Progo sendiri penyelenggaraan sekolah inklusif tingkat sekolah dasar telah diselenggarakan oleh 23 sekolah dasar. Dua puluh tiga sekolah tersebut tersebar di 12 kecamatan. Dua belas kecamatan itu antara lain kecamatan Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Temon, Kokap, Pengasih, Sentolo, Nanggulan, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Dari masing-masing kecamatan terdapat satu hingga lima sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi.

Namun sejauh ini dalam penerapan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo dalam hal, manajemen sekolah inklusif belum berjalan secara optimal. Hal ini sebabkan kurangnya pengetahuan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Permasalahan dalam kurikulum yaitu guru belum sepenuhnya memahami tentang rancangan program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sehingga, guru membuat rancangan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus disamakan dengan anak tidak berkebutuhan khusus. sarana dan prasana maupun fasilitas yang dimiliki sekolah belum sepenuhnya memadai untuk menunjang belajar anak berkebutuhan khusus secara maksimal. Bantuan pendanaan yang belum maksimal untuk pengadaan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus dan untuk untuk kebutuhan *assesmen*. Lingkungan masyarakat sendiri yaitu banyak orang tua yang masih enggan atau tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo yang ditinjau dari enam aspek kesiapan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data diskriptif. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo. Populasi dalam penelitaian ini adalah 23 kepala sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo. Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau yang menjadi suatu titik perhatian dalam penelitian (Arikunto, 2013: 161). Variabel dalam penelitian ini adalah kesiapan sekolah.

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dengan jenis angket tertutup. Pengukuran skala skor dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* karena untuk mengukur kesiapan. *Skala Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018: 136).

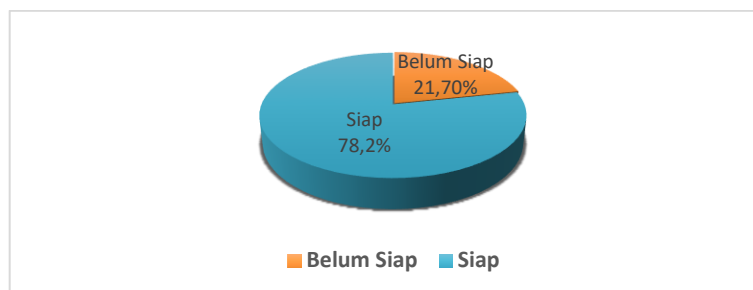
Kemudian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018: 199). Penyajian data dalam penelitian ini dengan persentase dan dijelaskan dengan kata-kata. Sehingga dapat diketahui tingkat kesiapan sekolah secara umum dan tingkat kesiapan sekolah yaitu ditinjau berdasarkan 6 aspek kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kulon Progo

Sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai peran penting untuk menghasilkan manusia-manusia penerus bangsa. Untuk memajukan suatu pendidikan maka dilaksanakannya suatu program layanan pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi merupakan suatu wadah untuk mencapai ketuntasan wajib belajar sembilan tahun.

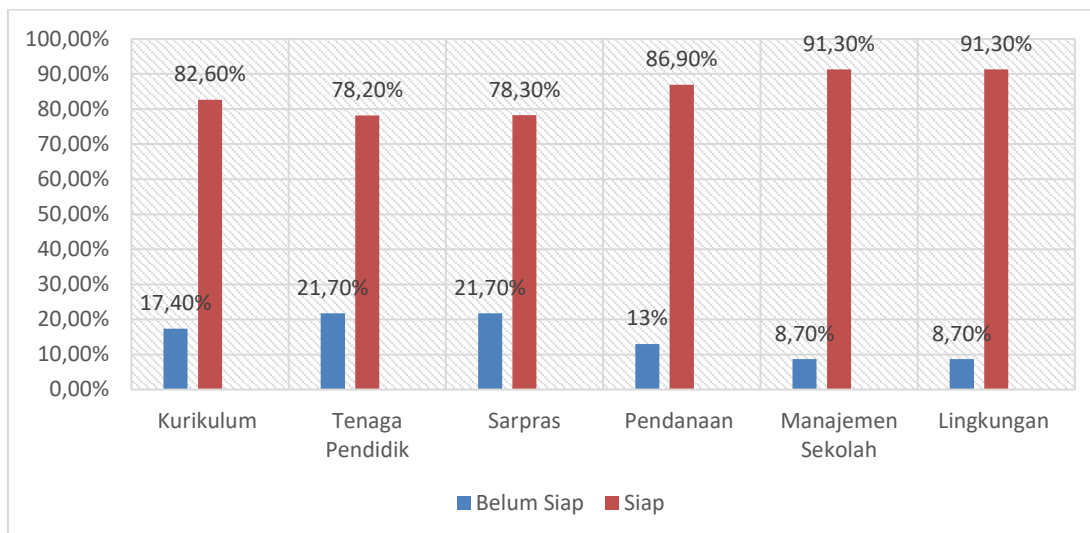
Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan angket atau kuesioner. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa 23 sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada diagram berikut:



Kepala sekolah sebagai *stakeholder* menilai sekolah yang mereka pimpin bersedia menerapkan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Secara umum tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi dalam kategori siap dengan perolehan hasil 78,2%. Siap dalam hal ini mempunyai arti bahwa sekolah tersebut telah mampu menerapkan pendidikan inklusi. Selain itu sekolah sudah siap dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen sekolah dan lingkungan masyarakat.

Namun, 21,7% sekolah belum siap dalam menerapkan pendidikan inklusi. Ketidaksiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi disebabkan adanya faktor kurang persiapan sekolah dalam melakukan penyesuaian yang menyangkut ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan aksesibilitas yang dimiliki oleh sekolah, keterbatasan guru pendamping khusus dan rendahnya partisipasi masyarakat (Mujito 2012: 15). Selain itu karena faktor ketidaksiapan sekolah dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen sekolah dan lingkungan masyarakat di sekolah tersebut.

2. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Kulon Progo di tinjau dari 6 Aspek Kesiapan.



a. Aspek Kurikulum

Pengumpulan data tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada aspek kurikulum dengan menggunakan angket. Angket tersebut di isi oleh 23 responden kepala sekolah. Hasil persentase kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek kurikulum diperoleh 17,4% dalam kategori belum siap dan 82,6% dalam kategori siap dalam menerapkan pendidikan inklusi.

Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek kurikulum yang dilihat dari, mengikuti proses pengembangan PPI, membentuk tim pengembang PPI, memiliki model format PPI dan melakukan modifikasi kurikulum dan isi kurikulum (Sabrina, Anggia Ayu & Dadang Sukirman. 2018: 116). Kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusi pada hakikatnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku disekolah tersebut. Untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat minat dan potensinya sehingga diperlukan kesiapan program pembelajaran individual (PPI) yang disusun berdasarkan acuan kurikulum nasional yang disesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik. Berdasarkan analisis diskriptif, sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada tingkat siap untuk aspek kurikulum. Hal ini dapat dilihat dari indikator kesiapan aspek kurikulum yaitu mengikuti proses pengembangan PPI, membentuk tim pengembang PPI, memiliki model format PPI, dan melakukan modifikasi kurikulum dan isi kurikulum.

Pada aspek kurikulum 17,4% atau 4 sekolah inklusi yang belum mampu melaksanakan layanan program pendidikan inklusi dengan baik. Hal ini dilihat dari jawaban responden pada angket kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi aspek kurikulum. Selain dari jawaban responden, nampak juga berdasarkan hasil wawancara bahwa, sekolah belum melaksanakan proses pengembangan PPI

dengan baik, selain itu guru belum melakukan modifikasi kurikulum maupun isi kurikulum untuk peserta didik ABK. Kemudian 82,6% atau 19 sekolah siap dalam menerapkan pendidikan inklusi. Dalam menerapkan pendidikan inklusi sekolah telah melaksanakan proses pengembangan PPI, membentuk tim PPI, memiliki model format PPI dan melakukan modifikasi kurikulum dan isi kurikulum.

b. Aspek Tenaga Pendidik

Pengumpulan data tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada aspek tenaga pendidik dengan menggunakan angket. Angket tersebut diisi oleh 23 responden kepala sekolah. Hasil persentase kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek tenaga pendidik diperoleh 21,7 % dalam kategori belum siap dan 78,2% dalam kategori siap dalam menerapkan pendidikan inklusi.

Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek tenaga pendidik yang dilihat dari ketersediaan tenaga pendidik pembimbing anak berkebutuhan khusus dan mengukur sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik (Garnida. 2015: 87). Dalam menerapkan pendidikan inklusi sekolah menggunakan guru pendidikan baik guru umum maupun khusus. Guru khusus didatangkan dari SLB terdekat, yang telah dijadwalkan oleh pihak sekolah. Guru pembimbing khusus juga didatangkan untuk membantu guru kelas ataupun guru mapel menyusun program pembelajaran individual. Selain itu memberikan bimbingan dalam menyusun asesmen pendidikan.

Pada aspek tenaga pendidik 21,7% atau 5 sekolah dasar inklusi yang belum mampu melaksanakan layanan program pendidikan inklusi dengan baik. Sekolah juga belum terdapat ketersediaan tenaga pendidik pembimbing ABK dan sekolah belum bisa mengukur sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian, 78,2% atau 18 sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi pada aspek tenaga pendidik sudah menggunakan seluruh sumber daya guru, baik guru umum maupun khusus namun dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Selain itu sekolah telah mendatangkan guru khusus dari SLB untuk membimbing ABK maupun guru umum.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo ada beberapa sekolah inklusi yang tidak memiliki guru pendamping khusus yang di datangkan dari SLB, salian itu guru khusus yang di datangkan oleh pihak sekolah dari SLB terdekat kedatangannya terbatas pada waktu-waktu tertentu.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Pengumpulan data tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada aspek sarana dan prasarana dengan menggunakan angket. Angket tersebut diisi oleh 23 responden kepala sekolah. Hasil persentase kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek sarana dan prasarana diperoleh 21,7 % dalam kategori belum siap dan 78,3% dalam kategori siap dalam menerapkan pendidikan inklusi.

Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek sarana dan prasarana. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun

2007, dijelaskan bahwa sarana dan prasana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah dan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Aspek sarana dan prasarana dapat dilihat dari pengadaan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus dan pengadaan sarana dan prasarana khusus.

Pada aspek sarana dan prasarana 21,7% atau 5 sekolah penyelenggara inklusi belum siap dalam menyediakan aksesibilitas maupun sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan 78,3% atau 18 sekolah siap dalam menerapkan pendidikan inklusi aspek sarana dan prasarana. Sekolah siap dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana khusus maupun aksesibilitas anak berkebutuhan khusus.

Setelah dilakukan wawancara, dari dua puluh tiga sekolah tersebut, sekolah belum mempunyai ruangan maupun alat asesmen. Asesmen dilakukan berdasarkan intruksi dari Dinas Pendidikan yang dilakukan di Gedung Autis Center Kabupaten Kulon Progo. Sekolah juga belum memiliki Alat Peraga Edukatif (APE) yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Selain itu sekolah juga belum memiliki ruangan khusus seperti ruang remedial, ruang konsultasi, ruang latihan, ruang keterampilan, dan penyimpanan barang.

d. Aspek Pendanaan

Pengumpulan data tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada aspek pendanaan dengan menggunakan angket. Angket tersebut diisi oleh 23 responden kepala sekolah. Hasil persentase kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek pendanaan diperoleh 13% dalam kategori belum siap dan 86,9% dalam kategori siap dalam menerapkan pendidikan inklusi.

Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek pendanaan yang dilihat dari ketersediaan dana bantuan khusus dari pemerintah, Ketersediaan biaya investasi sekolah, ketersediaan biaya personal sekolah, dana bantuan sumber dana lainnya. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Menurut (Rosilawati. 2015: 14) Pengalokasian dana khusus digunakan untuk keperluan, kegiatan identitas input siswa, memodifikasi kurikulum, intensif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pendanaan pendidikan inklusi diperoleh dari pemerintah, pemerintah pusat, *govermen organization*, masyarakat (orang tua peserta didik) dan lembaga swadaya masyarakat, dan / atau sumber dana luar negeri.

Pada aspek pendanaan 13% atau 3 sekolah belum siap pada aspek pendanaan. Hal ini dikarenakan sekolah belum memperoleh ketersediaan dana bantuan khusus dari pemerintah, ketersediaan biaya investasi, ketersediaan biaya personal, dan sekolah belum memperoleh dana bantuan dari sumber lainnya. Sebesar 86,9% atau 20 sekolah telah siap dalam aspek pendanaan. Hal ini mempunyai arti sekolah tersebut memperoleh ketersediaan dana bantuan khusus dari pemerintah, ketersediaan biaya investasi, ketersediaan biaya personal, dan sekolah belum memperoleh dana bantuan dari sumber lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa sekolah yang telah siap dalam menerapkan layanan pendidikan inklusi ini setiap tahunnya selalu memperoleh bantuan dana dari pemerintah yang digunakan untuk pengadaan sarana dan

prasarana, pendayagunaan peran serta masyarakat, keperluan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan keperluan insentif bagi tenaga pendidik (GPK).

e. Aspek Manajemen Sekolah

Pengumpulan data tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada aspek pendanaan dengan menggunakan angket. Angket tersebut diisi oleh 23 responden kepala sekolah. Hasil persentase kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek manajemen sekolah diperoleh 8,7% dalam kategori belum siap dan 93,7% dalam kategori siap dalam menerapkan pendidikan inklusi.

Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek pendanaan yang dilihat dari ketersediaan dana bantuan khusus dari pemerintah, Ketersediaan biaya investasi sekolah, ketersediaan biaya personal sekolah, dana bantuan sumber dana lainnya. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Menurut (Rosilawati. 2015: 14) Pengalokasian dana khusus digunakan untuk keperluan, kegiatan identitas input siswa, memodifikasi kurikulum, intensif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pendanaan pendidikan inklusi diperoleh dari pemerintah, pemerintah pusat, *govermen organization*, masyarakat (orang tua peserta didik) dan lembaga swadaya masyarakat, dan / atau sumber dana luar negeri.

Pada aspek manajemen sekolah 8,7 % atau 2 sekolah belum siap. Sekolah belum siap karena belum melaksanakan pengelolaan pendidikan berdasarkan mutu terpadu yaitu mengutamakan pengutamaan kepuasan pelanggan, perbaikan terus-menerus, kebiasaan berbicara dengan fakta, sikap menghargai orang lain dan melaksanakan fungsi sesuai pembagian tugas. Sedangkan 91,3% atau 21 sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi telah siap. Siap dalam hal ini mempunyai arti bahwa sekolah telah mengutamakan kepuasan pelanggan, perbaikan terus-menerus, kebiasaan berbicara dengan fakta, sikap menghargai orang lain dan melaksanakan fungsi sesuai pembagian tugas.

f. Aspek Lingkungan

Pengumpulan data tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo pada aspek lingkungan sekolah dengan menggunakan angket. Angket tersebut diisi oleh 23 responden kepala sekolah. Hasil persentase kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek lingkungan diperoleh 8,7% dalam kategori belum siap dan 93,7% dalam kategori siap dalam menerapkan pendidikan inklusi.

Kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo aspek lingkungan sekolah yang dilihat dari melibatkan anggota masyarakat, mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau orang tua, melibatkan orang tua dalam pengembangan staf dan keterlibatan staf sekolah. Keterlibatan masyarakat pada pendidikan inklusi, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, pengawasan, dan evaluasi (PPK-LK, 2011: 31). Keterlibatan warga sekolah mempunyai peran penting pada aspek kesiapan sekolah terutama lingkungan.

Pada aspek lingkungan 8,7% atau 2 sekolah belum siap dalam menerapkan pendidikan inklusi. Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa sekolah belum siap karena belum melibatkan anggota masyarakat dalam perencanaan maupun

pelaksanaan sekolah inklusi, belum mengadakan pertemuan secara rutin dengan masyarakat maupun orang tua peserta didik, sekolah juga belum melibatkan orang tua dalam pengembangan staf dan sekolah juga belum melibatkan staf sekolah. Sedangkan 91, 7% atau 21 sekolah sudah siap dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hal ini berarti lima sekolah penyelenggara pendidikan inklusi telah melibatkan anggota masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah juga sudah mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan orang tua peserta didik, sekolah juga telah melibatkan orang tua dalam pengembangan staf, dan keterlibatan staf sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo secara umum telah siap dalam menerapkan pendidikan inklusi. Delapan belas sekolah atau 78,2% sekolah telah menerapkan pendidikan inklusi berdasarkan enam aspek kesiapan sekolah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepala sekolah dalam memimpin sekolah menilai bahwa sekolah yang mereka pimpin telah siap dalam menerapkan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang belum siap dalam menerapkan pendidikan inklusi sebesar 22,7%.
2. Tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari 6 aspek kesiapan. Pada aspek kurikulum sebesar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo telah siap yaitu sebesar 82,6% dan belum siap sebesar 17,4%. Pada aspek tenaga pendidik sebesar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo telah siap yaitu sebesar 78,2% dan belum siap sebesar 21,7%. Pada aspek sarana dan prasarana sebesar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo telah siap yaitu sebesar 78,3% dan belum siap sebesar 21,7%. Pada aspek pendanaan sebesar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo telah siap yaitu sebesar 86,9% dan belum siap sebesar 13%. Pada aspek manajemen sekolah sebesar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo telah siap yaitu sebesar 91,3% dan belum sebesar 8,7%. Pada aspek lingkungan sebesar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Kulon Progo telah siap yaitu sebesar 91,3% dan belum sebesar 8,7%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung : PT Refika Aditama. 978-602-7948-77-8.
- Mujito and dkk. 2012. *Pendidikan Inklusi*. Jakarta : Badvose Media.
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

- PLB, 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- PPK-LK, Direktorat. 2011. *Pedoman Penyelenggara Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009)*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sabrina, Anggia Ayu & Dadang Sukirman. 2018. Implementasi Kurikulum pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, Volume 11 No. 2. Hal 105-112
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Pendidikan*
- Rofiah, Nurul Hidayati. 2015. "Bimbingan Belajar Untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar". Jawa Tengah : publikasiilmiah.ums.ac.id.diakses pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.21
- Rosilawati, Ina. 2015. *Inklusi, Trik Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Familia.